



PUTUSAN

Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Sahrir Bin Laupe, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat kediaman di Jalan Jalan Yahim, Rt. 01/rw.05, Nomor 30, Kelurahan Dobonsolo, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai Pemohon,

melawan

Hasmiah Binti Sirajudin, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Jalan Yahim, Rt. 01/rw.05, Nomor 30, Kelurahan Dobonsolo, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0105/Pdt.G/2015/PA.Stn, tanggal 23 November 2015, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Termohon (Hasmiah binti Sirajudin) untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon (Sahrir bin Laupe);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 1 dari 6 Hlm.
putusan Nomor 105/Pdt.G/2015/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator yang pada intinya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon pada dasarnya membenarkan dalil permohonan cerai dari Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, yang semuanya termuat dalam berita acara sidang';

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator, namun ternyata mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian,

Halaman 2 dari 6 Hlm.
putusan Nomor 105/Pdt.G/2015/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon karena Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon lagi, sementara Termohon dalam jawabannya mengakui dalil Pemohon dan tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil Pemohon, namun mengingat perkara ini merupakan perdata khusus, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti dan ternyata Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 3 dari 6 Hlm.
putusan Nomor 105/Pdt.G/2015/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi, sehingga perlu dicarikan solusinya yakni perceraian sebagai alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dipahami bahwa rumah tangga Penggugat kejadiannya secara terus menerus yang sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sentani, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 4 dari 6 Hlm.
putusan Nomor 105/Pdt.G/2015/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sahrir bin Laupe) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hasmiah binti Sirajudin) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1437 Hijriah, oleh kami Akbar Ali, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.H.I dan Abdul Salam, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah Hi. Djafar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Muhammad Nasir, S.H.I

Hakim Anggota,

Abdul Salam, S.H.I.

Ketua Majelis,

Akbar Ali, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Hlm.
putusan Nomor 105/Pdt.G/2015/PA Stn



Fatimah Hi. Djafar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp520.000,00
4. Redaksi	Rp.5000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp600.000,00

(enam ratus ribu
rupiah)

Halaman 6 dari 6 Hlm.
putusan Nomor 105/Pdt.G/2015/PA Stn